

PDS terjemahan ini didasarkan pada versi Inggrisnya yang bertanggal 10 April 2014.



Lembar Data Proyek

Lembar Data Proyek (Project Data Sheets/PDS) berisi informasi ringkas mengenai proyek atau program: Karena PDS merupakan pekerjaan yang sedang berjalan, beberapa informasi mungkin tidak disertakan dalam versi awal, tetapi akan ditambahkan setelah informasi tersedia. Informasi mengenai proyek yang diusulkan bersifat tentatif dan indikatif.

Tanggal Pembuatan PDS	–
PDS Diperbarui	31 Mar 14

Nama Proyek	Proyek Inisiatif Segitiga Karang-Program Rehabilitasi dan Manajemen Terumbu Karang (<i>Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative Project /COREMAP-CTI</i>)
Negara	Indonesia
Nomor Proyek/Program	46421-001
Status	Disetujui
Lokasi Geografis	–

Dalam menyiapkan program atau strategi negara, atau pembiayaan proyek mana pun, atau dengan menyebut atau merujuk wilayah atau daerah geografis tertentu dalam dokumen ini, Asian Development Bank tidak bermaksud membuat penilaian apa pun mengenai status hukum atau status lainnya atas suatu wilayah atau daerah.

Klasifikasi Sektor dan/atau Subsektor	Pertanian dan sumber daya alam / Manajemen Sumber Daya Alam Berbasis Air
Klasifikasi Tematik	Peningkatan kapasitas Pertumbuhan ekonomi Kelestarian lingkungan Perubahan iklim
Kategori Pengarusutamaan Gender	Pengarusutamaan gender yang efektif

■ Pembiayaan

Jenis/Cara Bantuan	Nomor Persetujuan	Sumber Pendanaan	Nilai yang Disetujui (ribu dollar)
Pinjaman	3094	Sumber daya modal biasa	45.520
Hibah	0379	Fasilitas Lingkungan Global (<i>Global Environment Facility</i>)	8.000
–	–	Mitra	13.140
TOTAL			US\$ 66.660

■ Kategori Perlindungan

Untuk informasi lebih jauh mengenai kategori perlindungan, lihat <http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories>

Lingkungan	B
Pemindahan Bukan dengan Sukarela	B
Masyarakat Adat	B

■ Ringkasan Persoalan Lingkungan dan Sosial

Aspek Lingkungan

–

Pemindahan Bukan dengan Sukarela

–

Masyarakat Adat

–

■ Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan

Selama Rancangan Proyek

–

Selama Pelaksanaan Proyek

–

■ Uraian

Proyek ini akan memungkinkan masyarakat pesisir dan lembaga pendukungnya untuk mengelola sumber daya terumbu karang, serta ekosistem dan keanekaragaman hayati terkait secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir. COREMAP-CTI akan mendukung rencana pembangunan sektor pemerintah dan target nasional untuk mendirikan kawasan konservasi perairan yang efektif. Pelaksanaan proyek akan berfokus pada peningkatan manajemen, kelanjutan, dan ketahanan kawasan konservasi laut (KKP). Intervensi akan menargetkan tiga (3) KKP di tingkat nasional dan tujuh (7) di tingkat kabupaten, yang terletak di (i) Kabupaten Bintan, Batam, Lingga, dan Natuna di Provinsi Riau; (ii) Kabupaten Tapanuli Tengah dan Nias Utara di Provinsi Sumatra Utara; (iii) Kabupaten Mentawai di Provinsi Sumatra Barat; (iv) KKP nasional Anambas di Kabupaten Anambas, Provinsi Riau; (v) KKP nasional Pulau Pieh di Kabupaten Pariaman, Provinsi Sumatra Barat; dan (vi) KKP Gilimatra di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (area proyek).

■ Dasar Pemikiran Proyek dan Kaitan dengan Strategi Negara/Regional

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 18% dari keseluruhan terumbu karang di dunia yang menjadikannya bagi flora dan fauna laut yang sangat beragam. Ekosistem pesisir Indonesia berperan sebagai pondasi yang penting bagi pertumbuhan ekonominya. Karena itu, manajemen berkelanjutan terhadap ekosistem terumbu karang merupakan tujuan utama rencana pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, yang dipandu oleh (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025), (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2010-2014), dan (iii) Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010-2014). Pemerintah memiliki sejumlah kebijakan untuk menjawab persoalan di sektor tersebut berkaitan dengan manajemen sumber daya pesisir dan kelautan, termasuk kebijakan tentang lingkungan, perikanan, kehutanan, pembangunan pulau-pulau kecil, pariwisata berbasis kelautan, serta transportasi dan pertambangan kelautan. Secara keseluruhan, berbagai kebijakan tersebut menunjukkan prioritas pemerintah di sektor ini dan menjadi bagian dari rencana pembangunan sektor. Indonesia juga berperan penting dalam Inisiatif Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (*Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security/CTI-CFF*), sebuah program kerja sama regional enam negara untuk mengelola sumber daya pesisir dan kelautan secara berkelanjutan di kawasan tersebut. Rendahnya kesadaran masyarakat pesisir, kapasitas kelembagaan yang kurang memadai untuk mengendalikan polusi di darat dan laut, kurangnya kerangka kelembagaan dan kapasitas guna mengelola kawasan lindung laut secara efektif, serta kemiskinan berkepanjangan di daerah pesisir, telah menyebabkan terdegradasinya sekitar 70% dari ekosistem terumbu karang di Indonesia. Untuk mengatasi berbagai masalah mendasar tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengadopsi pendekatan dari berbagai sisi, dengan fokus pada (i) peningkatan kapasitas kelembagaan; (ii) pengembangan sejumlah model untuk mendirikan dan mengelola kawasan konservasi perairan secara efektif; dan (iii) mengurangi kemiskinan di daerah pesisir melalui infrastruktur yang menghasilkan pendapatan dan mata pencaharian berkelanjutan. Proyek ini merupakan bagian terakhir dari program tiga fase ADB dan Bank Dunia yang bekerja sama erat dengan pemerintah di berbagai wilayah. Fase pertama (COREMAP I) meletakkan kerangka yang layak bagi sistem manajemen terumbu karang nasional di Indonesia. Fase kedua (COREMAP II) mengonsolidasikan basis pengetahuan dan mengadopsi pendekatan berbasis masyarakat untuk manajemen terumbu karang secara terdesentralisasi, serta membangun kesadaran publik yang tinggi terhadap upaya konservasi terumbu karang. COREMAP Fase II memulai pengembangan kelembagaan untuk model sistem kawasan konservasi perairan dan menguji kelayakan kegiatan mata pencaharian berkelanjutan guna mengurangi tekanan akibat kegiatan perikanan oleh masyarakat pesisir di area sasaran. Laporan penyelesaian proyek ADB dan Bank Dunia untuk Fase II menjelaskan beberapa pembelajaran yang dapat dipetik dan dimasukkan dalam rancangan proyek COREMAP-CTI. Hal ini mencakup perlunya (i) komitmen dan dukungan dari badan pemerintah setempat; (ii) integrasi analisis rantai nilai kegiatan mata pencaharian dalam rancangan proyek; dan (iii) pengarusutamaan persoalan gender secara efektif. Proyek ini akan turut membantu tercapainya target keseluruhan rencana pembangunan sektor kelautan dan perikanan, yaitu mengembangkan 20 juta hektar kawasan konservasi perairan paling lambat pada 2020 (15,7 juta hektar telah tercapai pada 2012) serta mengelola 15 spesies yang rentan, terancam punah, dan endemik. Proyek ini akan menciptakan model bagi pengelolaan kawasan konservasi perairan secara efektif dan model usaha mikro berkelanjutan bagi masyarakat. Fase konsolidasi ini akan mengembangkan model kawasan konservasi perairan dengan manajemen yang efektif, keberlanjutan keuangan, kapasitas untuk manajemen bersama dengan masyarakat, dan penegakan aturan. Proyek ini selaras dengan Strategi Kemitraan Negara Indonesia 2012-2014, dan relevan dengan dua pilar strategis, yaitu pertumbuhan inklusif dan kelestarian lingkungan. Proyek ini juga selaras dengan Rencana Tindakan Nasional (*National Plan of Action/NPOA*) Indonesia untuk CTI dan paket dukungan teknis ADB guna melaksanakan NPOA.

■ Dampak Pembangunan

Manajemen ekosistem terumbu karang secara berkelanjutan di area proyek

■ Hasil Proyek

Uraian Hasil

Kemajuan Menuju Hasil

Peningkatan kapasitas manajemen ekosistem terumbu karang pada kawasan konservasi perairan yang menjadi sasaran

■ Keluaran dan Kemajuan Pelaksanaan

Uraian Keluaran Proyek

Status Kemajuan Pelaksanaan (Keluaran, Kegiatan, dan Persoalan)

Penguatan kelembagaan dan manajemen terumbu karang; Dikembangkannya manajemen sumber daya berbasis ekosistem; Peningkatan mata pencaharian berbasis kelautan secara berkelanjutan; Manajemen proyek

Status Tujuan Pembangunan

Perubahan Material

-

-

■ Peluang Bisnis

Tanggal Pencatatan Pertama 14 Agu 13

Layanan Konsultasi

Semua konsultan akan dipekerjakan mengikuti Pedoman ADB tentang Penggunaan Konsultan. (Daftar periksa untuk tindakan yang diperlukan dalam mengontrak konsultan sesuai metode yang tersedia, dapat dilihat di buku pegangan elektronik tentang implementasi proyek (*e-Handbook on Project Implementation*): <http://www.adb.org/documents/handbooks/project-implementation/>) Pinjaman ini akan membiayai layanan konsultasi sebanyak 950 orang-bulan, yang terdiri atas 30 orang-bulan internasional dan 920 orang-bulan nasional. Dari antara konsultan nasional, 322 orang-bulan terdiri atas konsultan kabupaten (satu konsultan per kabupaten). Konsultan akan memberikan bantuan dalam hal manajemen proyek, keahlian teknis pada bidang ilmu utama, dan dukungan administrasi proyek. Layanan konsultasi 124 orang-bulan (nasional) akan memberikan bantuan teknis bagi Ditjen Perikanan Tangkap. Tiga orang konsultan nasional (62 orang-bulan) akan direkrut untuk membantu LIPI dalam pembuatan pangkalan data dan pemetaan. Selain itu, konsultan internasional 25 orang-bulan akan dibiayai dari hibah GEF untuk bantuan teknis terkait manajemen ekosistem kelautan. Pemilihan konsultan sesuai dengan metode seleksi ADB berdasarkan mutu dan biaya, dengan menggunakan rasio mutu-biaya 80:20, dan metode seleksi konsultan individual.

Pengadaan

Semua pengadaan barang dan jasa akan dilakukan sesuai Pedoman Pengadaan ADB. Di bawah proyek ini, pekerjaan sipil akan dilakukan pengadaannya melalui prosedur international competitive bidding (ICB) untuk paket bernilai di atas US\$10.000.000 atau nilai mata uang lain yang setara, dan melalui prosedur

national competitive bidding (NCB) yang disetujui ADB untuk paket bernilai paling besar US\$10.000.000 atau nilai mata uang lain yang setara. Pengadaan barang akan dilakukan melalui prosedur ICB untuk paket bernilai di atas US\$5.000.000 atau nilai mata uang lain yang setara, dan melalui prosedur NCB yang disetujui ADB untuk paket bernilai paling besar US\$5.000.000 atau nilai mata uang lain yang setara. Untuk paket bernilai paling besar US\$100.000 atau nilai mata uang lain yang setara, metode shopping (belanja barang dengan membandingkan harga) boleh digunakan. Pekerjaan skala kecil dan kontrak barang bernilai rata-rata US\$10.000-30.000 atau nilai mata uang lain yang setara, boleh diberikan kepada organisasi masyarakat sesuai prosedur pengadaan untuk partisipasi masyarakat dalam pengadaan, yang tercantum dalam Pedoman Prosedur ADB. Sebelum memulai pengadaan apa pun, ADB dan Pemerintah akan mengkaji hukum pengadaan publik dari pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan konsistensi dengan Pedoman Pengadaan ADB. Jika ada ketidaksesuaian antara hukum dan keputusan Pemerintah dengan Pedoman ADB, yang lebih diutamakan adalah Pedoman ADB.

Pemberitahuan Pengadaan dan Konsultasi

<http://www.adb.org/projects/46421-001/business-opportunities>

■ Jadwal

Persetujuan Konsep	–
Pencarian Fakta	–
Rapat Kajian Manajemen	–
Persetujuan	–
Misi Kajian Terakhir	–

■ Tonggak

No. Persetujuan	Persetujuan	Ditandatangani	Efektif	Selesai		
				Orisinal	Direvisi	Aktual
Pinjaman 3094	13 Des 13	23 Des 13	–	30 Jun 19	–	–

■ Pemanfaatan

Tanggal	Nomor Persetujuan	ADB (ribu US\$)	Lainnya (ribu US\$)	Persentase Bersih
Pemberian Kontrak Kumulatif				
9 Apr 14	Pinjaman 3094	0	0	0,00%
Pencairan Kumulatif				
9 Apr 14	Pinjaman 3094	0	0	0,00%

■ Status Perjanjian

Perjanjian dipilah-pilah menurut berbagai kategori berikut—laporan keuangan proyek yang diaudit, perlindungan, sosial, sektor, keuangan, ekonomi, dan lain-lain. Pemenuhan terhadap perjanjian dinilai per kategori dengan menerapkan kriteria berikut: (i) Memuaskan—semua perjanjian dalam kategori tersebut telah dipenuhi, namun diperbolehkan maksimum satu pengecualian, (ii) Sebagian Memuaskan—maksimum dua perjanjian dalam kategori tidak dipenuhi, (iii) Tidak Memuaskan—tiga atau lebih perjanjian dalam kategori tidak dipenuhi.

No. Persetujuan	Kategori						
	Sektor	Sosial	Keuangan	Ekonomi	Lainnya	Perlindungan	Sektor
Pinjaman 3094	–	–	–	–	–	–	–
Hibah 0379	–	–	–	–	–	–	–

■ Perincian Kontak dan Pembaruan

Pejabat ADB yang Bertanggung Jawab	Mohammed Nasimul Islam (mnislam@adb.org)
Departemen ADB yang Bertanggung Jawab	Departemen Asia Tenggara (<i>Southeast Asia Department, SERD</i>)
Divisi ADB yang Bertanggung Jawab	Divisi Lingkungan, Sumber Daya Alam, dan Pertanian, SERD (<i>Environment, Natural Resources & Agriculture Division, SERD</i>)
Lembaga Pelaksana	–

■ Tautan

Situs Web Proyek	http://www.adb.org/projects/46421-001/main
Daftar Dokumen Proyek	http://www.adb.org/projects/46421-001/documents
